

PENDIDIKAN NILAI MENUJU KEBEBASAN MANUSIA DALAM ALAM DEMOKRASI

Supriyono Purwosaputro
IKIP PGRI Semarang

Abstract: Value clarification only reflects and implicates in the gathering condition where all the people are able to develop the value of respectness, solidarity and interiority. Value clarification is the learning process that supports the value which is found in human being's life including value of freedom. The point of value is in the way of thinking, the way of attitudes, and the way of behaviour, either personal or together. Value clarification will make the students become more mature in finding and giving the positive value in their freedom.

Progressivism philosophy is relevant to develop the value of clarification to the freedom of human beings in democraton. Since there is an opinion of basic progresivism a value has a quality of social, besides progresivism giving pressure to the freedom of the students, progressivism also cares to the discipline of the students so that they get advantages. Progressivism as the philosophy of education will get big problems in managing an education in a managed curriculum.

Keywords: value clarification, freedom, democracy, progresivism

Sejak tahun 1982 OIEC (Biro Internasional Pendidikan Katholik) telah mencanangkan gerakan pendidikan nilai dalam pendidikan Katholik guna mempersiapkan kaum muda memasuki tahun 2000 (Kaswardi, 2000: 1). Asumsinya bahwa anak-anak yang memasuki Sekolah Dasar pada tahun 1982, nantinya pada tahun 2000 akan menjadi generasi baru.

Dalam pandangan OIEC di atas tampak bahwa pendidikan nilai menjadi hal yang amat penting bagi generasi muda (generasi baru). Mengapa pendidikan nilai menjadi penting bagi manusia (tidak hanya bagi generasi baru). Sekurang-kurangnya hal itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, nilai bagi hidup manusia memberikan tuntunan/pedoman utama kebersamaan manusia dalam menempuh kehidupan. Kedua, nilai

yang menjadi sifat formal intrinsik dan kebudayaan harus dilestarikan dari generasi ke generasi melalui pendidikan sebagai mediasinya. Dalam pendidikan dan kebudayaan manusia sekaligus mempunyai kedudukan dan fungsi ganda, yaitu sebagai ahli waris sekaligus pewaris (Sutrisno, 1994: 40).

Dalam pandangan Yunani kuno kebudayaan adalah paedeia atau pendidikan. Dengan demikian pendidikan harus berlangsung untuk dan di dalam kebudayaan. Pendidikan untuk kebudayaan dikarenakan pendidikan adalah sarana yang dianggap efektif untuk menyadarkan manusia akan adanya nilai-nilai yang diyakini dalam kehidupan. Di dalam kebudayaan, karena pendidikan itu sendiri bagian dari kebudayaan. Jadi, tidak ada

kemungkinan pendidikan berlangsung di luar kebudayaan.

Pada dasarnya pendidikan nilai itu hanya dapat diwujudkan atau dijabarkan dalam suatu kebersamaan. Dalam kebersamaan orang dapat mengembangkan nilai-nilai: saling menghormati, kesetiakawanan, kebebasan dalam berkegiatan, dan interioritas atau hidup batiniah yang ada dalam diri seseorang. Dalam kebersamaan tersebut nilai dasar dapat lebih ditumbuhkembangkan serta dijabarkan melalui berbagai kegiatan bersama, seperti rasa hormat pada kehidupan, persaudaraan, perdamaian, kerukunan, pengampunan, keadilan, kebenaran, dan lain sebagainya.

Mudji Sutrisno dalam pengantarnya pada buku *Budaya dan Kebebasan* (dalam Dewey, 1998: ix), menyatakan bahwa: "menjernihkan dan memahami konsep kebebasan merupakan sebuah proses panjang pergulatan nilai dengan konflik-konflik kesadaran intelektualnya serta masalah sebagai problematika filsafati" (problematika mendasar umat manusia).

Kebebasan dalam arti merdeka adalah fitrah yang melekat pada manusia sejak kehadiran di dunia. Oleh sebab itu, pendidikan mesti sejalan dengan hakikat tersebut. Karena manusia adalah penguasa atas dirinya sendiri. Paulo Freire melontarkan tentang tujuan akhir upaya proses pendidikan adalah memanusiakan manusia (humanisasi) yang berarti pemerdekaan atau pembebasan manusia dari situasi batas yang menindas dari luar kehendaknya (Topatimasang, 1998: v). Pendidikan harus berorientasi pada pengenalan realitas (objektif maupun subjektif).

Pendidikan nilai adalah proses pendidikan yang mampu mendukung nilai yang ada dalam hidup dan kehidupan manusia (termasuk di dalamnya nilai kebebasan). Persoalan yang muncul adalah apakah pendidikan nilai itu benar-benar mampu mendukung nilai kebebasan atau

bahkan sebaliknya? Aliran Filsafat Pendidikan apakah yang cocok dan mampu mendukung pendidikan nilai kebebasan?

Pendidikan Nilai dan Kebebasan

Proses nilai merupakan suatu proses yang terjadi dalam interaksi yang terus menerus antara subjek-subjek pendidikan, baik antara peserta didik dengan pendidik, antarpeserta didik dan antara orang tua pendidik dan peserta didik. Tanpa adanya interaksi itu proses pendidikan nilai tidak akan pernah terjadi. Pendidikan nilai juga merupakan upaya mengajarkan nilai-nilai sosial politik, religius, estetika, dan lainnya.

Nilai merupakan realitas abstrak yang dirasakan dalam diri masing-masing pribadi orang dan dijadikan pedoman hidupnya. Sebab nilai menduduki tempat penting dalam kehidupan seseorang. Hal inilah yang membuat orang lebih rela mengorbankan hidupnya daripada mengorbankan nilai yang telah diyakininya. Adanya nilai dapat dilacak melalui tiga realitas sebagai berikut:

Nilai	{	Pola tingkah laku	Seorang pribadi atau Satu kelompok
		Pola berpikir	
		Sikap-sikap	

Nilai yang ada dalam keyakinan seseorang akan mempengaruhi sikap pola berpikir dan pola tingkah laku seseorang. Nilai akan memberi arah hidup dalam kehidupan seseorang. Nilai tidak dengan sendirinya ada dalam diri seseorang, melainkan didapatnya secara aktif melalui proses pendidikan dalam arti luas, yaitu proses pendidikan dalam keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai bukanlah realitas yang tertutup dan berada sendirian, nilai-nilai itu saling terikat bersama-sama sebagai satu perangkat hidup manusia.

Nilai-nilai itu secara senyatanya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya.

Menurut tinggi-rendahnya, nilai-nilai dikelompokkan dalam hirarki sebagai berikut:

1. Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkat ini terdapatlah deretan nilai-nilai yang menggerakkan dan tidak mengenakan yang menyebabkan orang senang atau menderita.
2. Nilai-nilai kehidupan, dalam tingkat ini terdapatlah nilai-nilai yang penting bagi kehidupan.
3. Nilai-nilai kejiwaan, dalam tingkat ini terdapatlah nilai kejiwaan (*Geistige Werte*) yang tidak sama sekali tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini adalah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.
4. Nilai-nilai kerohanian, dalam tingkat ini terdapat modalitas nilai dari suci dan tak suci (*Wertmodaliteldes Heiligen und Unheiligen*). Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi, terutama Allah sebagai Pribadi Tinggi.

Pribadi manusia sebagai pemegang nilai, seperti dinyatakan Paulo Freire, adalah mahluk yang berelasi (*a being of relationships*). Hal ini yang memberi logika bahwa manusia itu memiliki sifat sosial. Hubungan yang mencakup seluruh aktifitas manusia.

Hubungan dengan	Kekuatan gaib
	Alam
	Kelompok
	Individu-individu
	Diri sendiri

Dalam kaitannya dengan pendidikan nilai, pendidik mempunyai tanggung jawab untuk:

1. melihat implikasi nilai etik dalam proses perubahan yang terjadi,

2. membantu untuk berkembangnya nilai-nilai dalam diri seseorang,
3. membantu, agar anak didik dapat mengambil sikap dan keputusan, dalam merencanakan kehidupan secara berarti. Proses demikian disebut *value clarification* atau pendidikan nilai.

Untuk kepentingan di atas maka perlu ditempuh pendekatan-pendekatan baru dalam proses pendidikan nilai, dengan berpijak pada:

1. Pemberian kesempatan memilih dari segi kognitif, yaitu bebas dengan berbagai alternatif, dengan pertimbangan akibat-akibat pilihannya.
2. Penghargaan pada segi afektif, yaitu perasaan bahagia dan gembira atas pilihannya dan memberikan penegasan pilihannya pada khalayak umum.
3. Pembinaan kesempatan yang luas untuk bertindak -segi psikomotorik, dengan melakukan perbuatan untuk pilihannya, diulang-ulang hingga membentuk pola perilaku yang bernilai.

Lebih lanjut perlu disimak beberapa acuan dalam pendidikan nilai, antara lain:

1. Nilai harus dipilih secara bebas oleh peserta didik. Nilai yang dipilih secara bebas itu akan diinternalisasikan, dipelihara, dan dijadikan pegangan hidup atau kaidah hidup.
2. Nilai harus dipilih dari berbagai alternatif. Adanya kebebasan memilih nilai, harus mengendalikan adanya berbagai alternatif nilai.
3. Peserta didik dalam memilih nilai harus melalui pertimbangan akibat-akibat dari nilai yang dipilih.
4. Harus ada kesediaan peserta didik untuk memelihara nilai yang telah dipilihnya.
5. Peserta didik harus memiliki kebera-

nian untuk mengemukakan nilai yang diyakininya di depan orang lain.

6. Nilai harus mampu membantu perkembangan pribadi peserta didik.
7. Peserta didik harus memiliki kesiapan dan kesediaan untuk mewujudkan nilai dalam kehidupannya.

Kebebasan manusia sesungguhnya juga merupakan salah satu nilai yang dijunjung oleh manusia. Kebebasan merupakan tanda yang memberi ciri khas pada kodrat manusia. Seseorang akan menjadi pribadi yang berarti jika ia menjadi mampu memilih yang dikehendaki dan yang dikerjakan. Kebebasan manusia memiliki makna positif. Maksudnya dengan memiliki dan melalui kebebasan manusia dapat memperjuangkan dan memperlihatkan eksistensinya yang berbeda dengan lain.

Kebebasan manusia tampaknya merupakan sesuatu yang rumit (komplek) sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh John Dewey, yaitu apakah kebebasan merupakan sesuatu yang telah ada dalam watak manusia, ataukah merupakan hasil dari situasi tertentu? Apakah kebebasan manusia itu harus dipertanggungjawabkan dengan demikian beratnya sehingga kebanyakan orang menjadi takut untuk menggunakannya?

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Dewey (1998) itu merupakan tantangan bagi pendidikan nilai, maksudnya bahwa pendidikan nilai harus bisa membawa peserta didik kepada kesadaran, kebebasan yang mengkait dengan pertanyaan-pertanyaan di atas. Hal ini penting agar peserta didik menjadi sadar akan posisi kebebasannya dan dapat memberi nilai positif pada kebebasannya itu.

Kebebasan itu adalah bahwa setiap orang karena dianggap telah menerima dari dalam kearifan yang diperlukan untuk bertingkah laku, pada saat lahir telah

membawa hak yang sama dan tak tertiadakan untuk hidup tanpa tergantung pada sesamanya.

Beberapa hal yang terdapat dalam kebebasan itu:

1. Kebebasan manusia berada dalam konteks suasana demokratis atau terwujud dalam kehidupan antar sesama manusia yang meliputi suasana saling membutuhkan bukan saling memusuhi atau saling menghilangkan.
2. Kebebasan manusia itu bersifat kodratiah yang dianugerahkan oleh Tuhan pada tiap-tiap manusia maka dalam kearifan kehidupan manusia tidak dibenarkan adanya suasana untuk mengurangi, menghalangi atau bahkan menghilangkan kebebasan.
3. Kebebasan manusia memberi keleluasaan hidup tanpa bergantung pada sesamanya dan memberi keleluasaan pula pada manusia untuk menyelesaikan berbagai masalah pribadinya.

Kebebasan secara hakiki berarti pula komitmen yang disertai kesadaran tanggung jawab (Puspowardoyo, 1994: 74). Pandangan senada dikemukakan oleh Suseno (1987:22), yang membedakan antara kebebasan sosial dan kebebasan eksistensial. Kebebasan sosial merupakan kebebasan yang diterima oleh manusia dari lapangan pergaulannya di masyarakat.

Artinya bahwa manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebebasan yang terbatas, karena kebebasan itu diterimanya dari lingkungan pergaulan masyarakat manusia yang di dalamnya masing-masing manusia akan mendapatkan kebebasan pula. Kebebasan eksistensial pada hakikatnya berdiri di atas kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Sifatnya positif, artinya kebebasan itu tidak menckankan segi bebas dari apa, melainkan bebas untuk apa. Kita menjadi sanggup untuk menentukan

kita sendiri. Kebebasan itu mendapatkan wujudnya yang positif dalam tindakan kita yang disengaja.

Dalam kaitannya dengan konsep di atas, secara implisit tersirat adanya tanggung jawab dari masing-masing kebebasan. Kebebasan sosial akan membawa konsekuensi adanya rasa tanggung jawab dari masing-masing pemilik dan penanggung kebebasan itu kepada masyarakat. Sedangkan kebebasan eksistensial menuntut adanya tanggung jawab dari pribadi manusia dalam hal menggunakan kebebasan.

Aktualisasi kebebasan manusia dalam ide maupun perwujudannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Iswarahadi (dalam Basis, 1988: 22) mengajukan adanya faktor dari luar dan faktor dari dalam diri manusia. Faktor kondisi dari luar meliputi: faktor material, faktor sosial, faktor budaya, faktor politik, dan sebagainya. Faktor kondisi dari dalam meliputi: faktor psikologis emosional, faktor kebiasaan, faktor intelegensi, dan faktor integritas.

Seseorang disebut bebas apabila:

1. Dapat menentukan sendiri tujuan-tujuannya dan apa yang akan dilakukannya.
2. Dapat memilih antara kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya.
3. Tidak dipaksa terikat untuk membuat sesuatu yang tidak dipilihnya sendiri.

Tidak semua pembatasan dari kemungkinan untuk bertindak dianggap melawan kebebasan. Pembatasan yang keluar dari keterbatasan kita sendiri tidak mengurangi kebebasan diri kita. Kebebasan akan muncul apabila kemungkinan untuk bertindak tidak dibatasi oleh pihak lain dalam bentuk paksaan atau tekanan.

Beberapa macam kebebasan:

1. Kebebasan jasmaniah yang jangkauannya ditentukan oleh kemampuan badan kita sendiri.
2. Kebebasan kehendak yang

jangkauannya sejauh kemungkinan manusia untuk berfikir dan menghendaki apa saja.

3. Kebebasan moral yang berarti tidak adanya macam-macam ancaman, tekanan, larangan dan lain-lain desakan yang tidak menjerus kepada paksaan fisik maupun psikis.
4. Kebebasan bertanggung jawab yang berarti kebebasan yang berhadapan dengan kewajiban moral. Sikap moral yang dewasa adalah sikap yang bertanggung jawab dan tidak mungkin ada tanggung jawab tanpa kebebasan, jadi kebebasan itu mengandung:
 - a. kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri.
 - b. kemampuan untuk bertanggung jawab.
 - c. keseluruhan kondisi yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan tujuan hidupnya.

Kebebasan yang didasarkan pada sikap, sistem nilai dan pola pikir berarti tingkah laku berdasarkan kesadaran bukan instingtif. Kebebasan sebagai kenyataan hidup manusia membuat manusia yakin bahwa ia mampu memilih di antara berbagai kemungkinan, mampu mengembangkan rasa tanggung jawabnya, mampu menilai secara moral perbuatan-perbuatan manusia.

Progresivisme dan Pendidikan Nilai yang Demokratis

Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Berhubung dengan itu progresivisme kurang menyetujui adanya pendidikan yang bercorak otoriter, baik yang timbul pada

jaman dahulu maupun pada jaman sekarang (Barnadib, 1997: 28).

Progresivisme cukup mempengaruhi upaya rekonstruksi pendidikan modern telah banyak memberi tekanan dalam masalah kebebasan/kemerdekaan pada diri peserta didik. Di sekolah-sekolah yang menganut aliran progresivisme, kebebasan para peserta didik sangat diutamakan. Peserta didik senantiasa didorong untuk berani memiliki, menghayati dan bertindak merealisasikan kebebasannya dalam berpikir maupun berperilaku. Sistem pendidikan progresivisme memberi keleluasaan maupun kebebasan peserta didik untuk berinisiatif dan percaya pada diri sendiri sehingga mereka dapat berkembang dan mengalami kemajuan pribadinya secara wajar tanpa menemui benturan atau hambatan dari pihak kliennya. Kebebasan dalam alam pendidikan progresivisme yang demokratis harus dalam suasana menerima adanya realitas perbedaan pribadi dari tiap-tiap peserta didik.

Dalam banyak hal, progresivisme itu identik dengan pragmatisme. Apabila orang menyebut pragmatisme berarti progresivisme begitu pula sebaliknya. Secara ontologis progresivisme mengandung pengertian dan kualitas evolusionistis yang kuat. Untuk ini, pengalaman diartikan sebagai ciri dari dinamika hidup dan hidup adalah perjuangan, tindakan dan perbuatan. Berarti pengalaman adalah perjuangan pula. Selain kemajuan atau progres, lingkungan, dan pengalaman mendapatkan perhatian yang cukup dari progresivisme. Sehubungan dengan ini, menurut progresivisme, ide-ide, teori-teori atau cita-cita itu tidaklah cukup hanya diakui sebagai hal-hal yang ada, tetapi yang ada ini haruslah dicari, artinya bagi suatu kemajuan atau maksud baik yang lain. Di samping itu, manusia harus dapat memfungsikan jiwanya untuk membina hidup yang mempunyai banyak persoalan yang silih berganti ini (Barnadib, 1997: 29).

Sehubungan dengan hal di atas maka

seorang guru yang progresif harus memberi kemungkinan dan keleluasaan pada peserta didiknya untuk mendapatkan dan mengolah pengalaman-pengalaman belajar sehingga mereka mengalami kemajuan (*progress*) yang berarti.

John Dewey (1859-1952) adalah seorang tokoh pendidikan progresivisme yang meletakkan inti filsafat pendidikannya pada "rangkaihan kesatuan pengalaman" atau "*experiential continuum*". Rangkaian kesatuan pengalaman memiliki implikasi penting bagi pendidikan, yaitu hubungan kelanjutan di antara pikiran dengan benda (zat).

Kedua macam hubungan kelanjutan itu terdapat dalam hubungan kelanjutan dari pengalaman yang mencakup dalam kurun waktu tertentu berbagai macam aspek pengalaman saling berhubungan, dan sepanjang waktu pengalaman itu berlanjut sebagai rentetan kejadian. Bagi John Dewey, di dalam mengalirnya arus pengalaman (*experiential continuum*) itu terdapat dua macam proses yang terutama sekali penting untuk filsafat pendidikan, yaitu proses mengetahui dan proses evolusi. (terjadinya secara berangsur-angsur) (Ali, 1993: 150).

Pendidikan progresivisme yang mendasarkan pada ide kebebasan, bukanlah filsafat pendidikan yang dogmatis. Dan oleh karena itu Dewey menolak asas kebebasan yang bersifat negasi (yaitu kebebasan untuk berbuat sesuatu asalkan tidak mengganggu/menghalangi kebebasan orang lain). Kebebasan yang dikehendaki Dewey adalah kebebasan yang bersifat positif, yaitu kebebasan yang juga dianggap sebagai "kepribadian" merupakan sesuatu yang harus dicari, diperoleh dan dibina terus-menerus. Kebebasan dengan demikian menjadi sasaran/target dari pendidikan, bukan sebagai landasan bagi pendidikan.

Dalam pandangan filsafat progresivisme, nilai tidak timbul dengan sendirinya, tetapi ada faktor-faktor yang merupakan prasyarat. Nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa maka dengan

demikian menjadi mungkin adanya saling hubungan seperti yang ada dalam masyarakat pergaulan. Jadi, masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai-nilai. Filsafat progresivisme seperti yang diungkap Barnadib (1997: 31) memiliki anggapan bahwa nilai itu mempunyai kualitas sosial. Kualitas sosial dari nilai menjadi jelas hakikatnya bila dihubungkan dengan tinjauan tentang aku. Seseorang akan sangat sadar mengenal dirinya bila orang secara sadar berada aktif di tengah-tengah orang lain. Agar orang dapat memiliki aku yang baik ia harus aktif di lingkungan (masyarakat) aku. Ia makin menjadi sadar akan akunya karena makin mengerti akan diri sendiri dan pribadi-pribadi (orang lain). Karena makin adanya keharusan hubungan dengan orang lain maka nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seseorang tidak lagi hanya bersifat intrinsik, melainkan juga bersifat instrumental.

Di samping nilai mempunyai sifat sosial, juga bersifat individual. Landasan pandangan ini adalah bahwa masyarakat dapat ada karena adanya orang-orang sebagai anggota (Barnadib, 1997: 32).

Nilai-nilai dalam pendidikan yang progresive bukanlah nilai-nilai yang bersifat kaku dan tertutup, melainkan nilai-nilai yang bersifat fleksibel dan terbuka. Nilai-nilai itu merupakan instrument yang mendorong peserta didik untuk mencapai tujuan yang akan menyebabkan terjadinya kemajuan (*progress*). Progresivitas senantiasa menekankan pada tumbuh dan berkembangnya sikap mental dan pemikiran dari setiap peserta didik dalam menghadapi berbagai masalah. Kemajuan yang dicapai dengan kebebasan oleh masing-masing peserta didik tentulah bersifat spesifik. Dalam kaitan itu progresivisme sulit untuk mencapai formula umum karena progresivisme tidak mengenal nilai-nilai yang final (*mandeg*).

Para ahli pendidikan progresif cenderung mengarahkan kurikulum pendidikan yang memberi kesempatan dan

kebebasan kepada peserta didik untuk benar-benar dapat belajar dari tindakannya. Pengetahuan tidak terbentuk sebelum belajar, tetapi pengetahuan akan terbentuk jika peserta didik dan guru dapat mencapai persesuaian dalam maksud dan tujuan akhir pendidikan yang senantiasa berkembang (Ali, 1993: 148).

Pandangan progresivisme perihal kurikulum juga menganggap pengalaman edukatif bersifat eksperimental dan terencana serta tersusun secara teratur. Pengalaman edukatif merupakan berbagai pengalaman yang serasi tujuannya sesuai prinsip-prinsip pendidikan, yang setiap proses belajarnya membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Dalam kaitan itu maka sekali lagi kurikulum pendidikan harus bersifat terbuka yang senantiasa disesuaikan dengan sifat-sifat dan kebutuhan peserta didik (Barnadib, 1997: 38).

Pelaksanaan pendidikan nilai kebebasan menuju terwujudnya kepribadian peserta didik yang mandiri sebagaimana yang diidealkan oleh aliran progresivisme sangat membutuhkan suasana demokratis dalam kelas maupun sekolah sebagai lingkungan masyarakat kecil. Suasana demokratis yang diidealkan adalah bahwa masing-masing personel dalam lingkungan sekolah itu harus memiliki sikap terbuka, saling memberi kebebasan, dan saling mendorong terwujudnya kemajuan (*progress*).

Van Sickle memusatkan pada pengalaman kelas yang demokratis. Van Sickle memilih lima nilai yang mewarnai suatu situasi belajar dimana demokrasi dipraktekkan: (1) tiap siswa mempunyai kesempatan belajar yang sama; (2) kesejahteraan masing-masing individu dijadikan maksimal; (3) sistem penghargaan dan hukuman responsif terhadap perbuatan siswa; (4) masing-masing individu bertanggung jawab atas pengaruhnya pada kesejahteraan orang lain; dan (5) pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang

diajarkan yang meningkatkan kesejahteraan masing-masing individu dan kesejahteraan orang lain. Arah pendekatan VanSickle ini tidak berbeda dari pendekatan setiap guru humanistik dalam arti pemekarannya terletak pada individu dan tanggung jawab individu. Walaupun titik beratnya konsisten dengan praktek-praktek demokratis, perspektifnya tidak berpusat pada keterlibatan siswa dalam pembuatan keputusan yang aktif yang menyangkut lingkungan sosial di mana siswa memainkan peranan kehidupan sekolah (Stanley, 1991: 142).

Beberapa Catatan atas Progresivisme

Progresivisme sebagai aliran filsafat pendidikan, dapat dianggap sebagai satu aliran filsafat pendidikan yang relevan dan mendukung pelaksanaan pendidikan nilai menuju kebebasan manusia dalam alam yang demokratis. Dalam kaitan itu, progresivisme memiliki nilai lebih bagi kemajuan pendidikan karena progresivisme selalu memberi keleluasaan dan dorongan bagi setiap insan pendidikan yang selalu mendambakan terwujudnya kemajuan (*progress*). Pendidikan yang progresive sangat membutuhkan suasana yang demokratis, yang di dalamnya tiap-tiap peserta didik memperoleh keleluasaan dan kebebasan untuk mengaktualisasikan segala potensinya hingga mencapai kemajuan yang tidak berhenti (*mandeg*). Progresivisme memandang nilai sebagai sesuatu yang fleksibel dan terbuka. Oleh karena itu, para peserta didik harus mampu mencari, mengolah, dan menginternalisasikan nilai-nilai secara spesifik dan terbuka sehingga ia menjadi pribadi yang maju dan mandiri. Pendidikan yang berdasarkan pada aliran progresivisme memandang kurikulum pendidikan sebagai pengalaman edukatif yang bersifat eksperimental, terencana, dan tersusun secara teratur.

Melihat rumusan tersebut maka progresivisme tampak akan mengalami

kesulitan besar, yaitu dalam hal menata pengalaman edukatif yang terencana dan tersusun rapi. Di samping itu, tampak pula bahwa progresivisme sebagai satu aliran filsafat pendidikan akan berada dalam suatu suasana dilematis yaitu bahwa di satu pihak progresivisme sangat menganjurkan kebebasan dalam proses pendidikan agar tiap-tiap peserta didik mengalami kemajuan (*progress*). Di lain pihak, dalam realitas praktik, sulit untuk memberi kebebasan mutlak bagi tiap-tiap peserta didik karena para peserta didik selalu dihadapkan pada kebebasan masing-masing dan kurikulum yang terencana dan tersusun secara rapi dalam sistem persekolahan yang klasikal.

Simpulan

Berangkat dari hal-hal yang telah diutarakan sebelumnya (mengenai pendidikan nilai dan kebebasan) maka dapat dianjurkan beberapa simpulan, sebagai berikut:

1. Pendidikan nilai menjadi penting dalam rangka mendewasakan peserta didik di dalam mencari kebebasan dan memberi nilai positif pada kebebasan yang dimilikinya itu.
2. Pendidikan nilai perlu dilakukan dalam kerangka pendekatan baru, yaitu pendekatan yang memberi kebebasan pada peserta didik untuk mencari, memilih, mensikapi, dan memberi tindakan pada kebebasan yang dirasakan ada dalam dirinya.
3. Pendidikan nilai menjadi sarana paling strategis untuk melestarikan nilai dasar yang menjadi pedoman, tuntunan hidup manusia, dari generasi kebebasan generasi. Dengan pendidikan nilai yang mampu memberi transformasi nilai-nilai dasar, generasi penerus menjadi lebih merasakan dan yakin dalam menempuh hidup dan kehidupannya.
4. Pendidikan yang berlandaskan pada

aliran filsafat progresivisme, diasumsikan sangat relevan dan mendukung pelaksanaan pendidikan nilai menuju kebebasan manusia dalam alam yang demokratis. Di sini peserta didik bebas dari segala tekanan dan bebas pula mengeksplorasi potensi dan kebebasannya secara demokratis. Progresivisme di samping memberi tekanan pada kebebasan peserta didik, tetapi juga tidak mengesampingkan disiplin peserta didik agar mengalami kemajuan yang berarti, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain (sesamanya)

5. Progresivisme sebagai filsafat pendidikan akan mengalami kesulitan besar dalam menata pengalaman edukatif menjadi kurikulum yang terencana dan tersusun teratur. Hal ini disebabkan bahwa pengalaman edukatif yang sesungguhnya (murni), merupakan pengalaman yang mengalir terus-menerus, sehingga sulit untuk direncanakan secara sistematis dan teratur (terformat). D

Kaswardi, EMK (Ed.). 1993. *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*. Jakarta: Grasindo.

Puspowardoyo, Suryato. 1994. *Filsafat Pancasila*. Jakarta: Gramedia.

Stanley, Wiliam B. (Peny). 1991. *Tinjauan tentang Penelitian dalam Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 1976-1983*. Surabaya: Air Langga University Press.

Suseno, Frans Magnis. 1987. *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia.

Sutrisno, Mudji. 1995. *Pendidikan Pemerdekaan*. Jakarta: Obor.

Sutrisno, Slamet. 1994. *Kebudayaan, Peradaban dan Pendidikan*. Yogyakarta: Liberty.

Topatimasang, Roem. 1998. *Sekolah itu Candu*. 1998. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Daftar Rujukan

Ali, Ali. 1993. *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Kota Kembang.

Barnadib, Imam. 1997. *Filsafat Pendidikan Sistem dan Metode*. Yogyakarta: Andi.

BASIS. 1998. Edisi Juni. Yogyakarta.

Dewey, John. *Budaya dan Kebebasan*. 1998. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.